

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas akan terbaca betapa pendidikan nasional diharapkan mampu melahirkan manusia yang religius dan bermoral, menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan bertanggung jawab (Soedijarto, 2009:118). Masih menurut Soedijarto (2009:141) proses mengidentifikasi dan merumuskan tujuan pendidikan yang menggambarkan kompetensi, pengetahuan dan sikap disebut tahap pertama perencanaan kurikulum. Setelah tahap pertama ditentukan langkah selanjutnya adalah merancang struktur program kurikulum yang memuat jenis-jenis mata pelajaran. Tahapan selanjutnya setelah kurikulum selesai disusun barulah kita memasuki tahap pengembangan kurikulum yang akan meliputi penyusunan garis besar program belajar mengajar (pengembangan kurikulum suatu mata pelajaran), dan pengembangan program pembelajaran.

Sanjaya (2008: 31) menyatakan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan. Perumusan ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya fungsi dan peran kurikulum. Setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan pada asas-asas tertentu.

Kurikulum merupakan komponen sistem pendidikan yang harus selalu berubah seiring dengan perubahan dinamika kehidupan di masyarakat. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008) dikemukakan beberapa faktor yang membuat kurikulum harus selalu berubah. Pertama, karena adanya perubahan filosofi tentang manusia dan pendidikan, khususnya mengenai hakikat kebutuhan peserta didik terhadap pendidikan. Kedua, karena cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga materi pelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik pun semakin banyak dan beragam. Ketiga, adanya perubahan masyarakat, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun daya dukung lingkungan alam, baik pada tingkat lokal maupun global.

Sementara ini masih banyak anggapan bahwa kurikulum merupakan sesuatu hal yang tidak pernah terlepas dengan kegiatan PBM di ruang kelas. Pemahaman ini tidak memiliki alasan yang kuat. Menurut Hamalik (2008:10) kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Komponen yang dimaksud antara lain bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan, karyawan tata usaha, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mempersiapkan penyusunan kurikulum, faktor-faktor di atas harus diperhatikan.

Idi (2006:182) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus, yakni dengan cara memperbaiki, memantapkan dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan setelah ada pelaksanaan dan sudah diketahui hasilnya. Hal ini mempunyai implikasi bahwa kurikulum senantiasa mengalami revisi. Perbaikan tersebut tetap mengacu pada apa yang sudah ada dan tetap fokus kedepan, sehingga keberadaannya cukup berarti bagi peserta didik dan bersifat dinamis.

Perjalanan kurikulum dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan. A. Ferry (2007:107) menjelaskan perjalanan kurikulum yang diawali tahun 1945-1949 dikeluarkan Kurikulum 1947. Tahun 1950-1961, ditetapkan Kurikulum 1952. Kurikulum terakhir oleh pemerintahan orde lama adalah Kurikulum 1964. Masa Orde Baru lahir empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama Kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru dengan sebutan Kurikulum 1994. Kurikulum ini menjadi kurikulum terakhir pada masa Orde Baru.

Pada era reformasi muncul kurikulum 2004 yang lebih dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pada tahun 2006 dilengkapi dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi yang memandu sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1 Ayat 15), dijelaskan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan dengan memerhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Berdasar pemahaman di atas, maka pemerintah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kurikulum nasional bukan lagi bersifat seragam namun sudah menyertakan kekhasan masing-masing sekolah. Kurikulum yang dimaksud adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang saat ini tengah dijalankan oleh setiap satuan pendidikan. Sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum. Bukan berarti sekolah bebas tanpa batas mengembangkan kurikulumnya. Dalam pelaksanaannya sekolah tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan rambu-rambu operasional standar yang dikembangkan oleh pemerintah, serta merujuk pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) yang telah ditetapkan melalui Permen Nomor 23 Tahun 2006 untuk SKL dan Permen Nomor 22 Tahun 2006 untuk SI.

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang dimaksud standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP dan kalender pendidikan sesuai Permendiknas No. 22 Tahun 2006. Saat ini KTSP telah digulirkan oleh pemerintah untuk dapat dilaksanakan di semua sekolah. Peran serta guru didalam mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan memiliki peranan kunci. Karena ditangan guru materi kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didik didisain dengan menyesuaikan dengan potensi ditempat mereka mengajar.

Pembakuan standar bagi sekolah dasar dan menengah, tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan oleh sekolah di Indonesia. Perubahan penggunaan kurikulum berdasarkan SNP memerlukan pemahaman yang terencana dengan baik. Tindakan ini sangatlah perlu dilakukan agar roh SNP khususnya dalam pengembangan kurikulum dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan KTSP memberi konsekuensi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk berkembang dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki masing-masing sekolah. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum seluas-luasnya dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kewenangan yang diberikan demikian luas, dikhawatirkan sekolah-sekolah tersebut akan menghadapi beberapa persoalan. Persoalan yang muncul adalah apakah kondisi aktual satuan pendidikan dan sekolah-sekolah beserta sumber dayanya sudah memiliki kesiapan untuk mengembangkan dan melaksanakan KTSP.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 BAB X Pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Dalam pasal 38 ayat 2 juga disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Terkait dengan itu Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disingkat SNP) dijadikan landasan atau pedoman pengembangan satuan pendidikan. SNP tersebut dimaksudkan sebagai acuan pengembangan dan pengendalian pendidikan, antara lain pengembangan kurikulum, kompetensi lulusan, penilaian, proses pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 juga

menyebutkan standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Dalam rangka penetapan standarisasi pendidikan juga lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketentuan tentang SNP tentunya akan berupa dokumen, yang menurut UU Nornor 20 Tahun 2003 yang telah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional. Dengan adanya Sekolah Standar Nasional, masyarakat dapat memperoleh gambaran nyata tentang penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada Sekolah Standar Nasional.

Dalam kerangka itu, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyelenggarakan rintisan pengembangan Sekolah Standar Nasional pada jenjang SMP, dan selanjutnya disebut SMP Sekolah Standar Nasional (SSN). SMP SSN diharapkan dapat memberikan wujud nyata SMP seperti yang dimaksudkan dalam SNP dan menjadi acuan atau rujukan sekolah lain dalam pengembangan sekolah, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekolah lain yang sejenis diharapkan dapat bercermin untuk memperbaiki diri dalam menciptakan warna psiko-sosial sekolah untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu, bermakna, dan menyenangkan sekaligus mencerdaskan. Selain itu, dengan adanya SSN, diharapkan SMP-SMP lain yang berada pada daerah yang sama dapat terpacu untuk terus mengembangkan diri dan mencapai prestasi dalam berbagai bidang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. SSN diharapkan juga berfungsi sebagai patok duga (*benchmark*) bagi sekolah dalam mengembangkan diri menuju layanan.

Mengingat keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka untuk sosialisasi SNP pemerintah menunjuk sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan untuk di kategorikan sebagai sekolah standar nasional. Pada kelompok sekolah ini, dalam melaksanakan SNP, pemerintah memberikan bantuan pendanaan untuk bisa melaksanakan tuntutan SNP. Beberapa kendala dihadapi oleh sebagian SSN dalam melaksanakan program SNP. Disamping pemahaman tentang SNP itu sendiri, sekolah-sekolah ini harus melaksanakan kebiasaan yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Inilah tantangan yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut.

Bagi pelaku pendidikan, pelaksanaan KTSP di sekolah banyak mengalami kendala. Hal ini sangat di maklumi karena kurikulum yang digunakan sebelumnya yaitu kurikulum yang bersifat sentralistik. Merubah pola pikir dari sentralistik ke mandiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Arahan serta sosialisasi kepada guru berkenaan dengan pelaksanaan KTSP perlu langkah yang terencana serta terarah. Dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan rintisan pengembangan Sekolah Standar Nasional pada jenjang SMP yang disebut Sekolah Standar Nasional. Sekolah-sekolah inilah nantinya yang diharapkan dapat mewujudkan kebijakan yang telah digariskan dalam SNP dan menjadi acuan sekolah lain dalam pengembangan sekolah.

Seiring dengan meningkatnya jumlah Sekolah Standar Nasional di berbagai daerah serta pemahaman pengembangan SNP yang harus dilaksanakan. Penekanan penelitian ini adalah pengembangan kurikulum. Mengingat ini adalah hal yang baru bagi sekolah maka dalam pelaksanaannya pasti terjadi kekurangan disana sini. Inilah yang membuat penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pengembangan kurikulum di Sekolah Standar Nasional SMP.

B. Fokus Penelitian

Setelah memahami beberapa penjelasan dari bab pendahuluan di atas maka situasi sosial yang ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah SMPN 40 Semarang. Sekolah ini adalah salah satu SSN di Kota Semarang yang telah mendapat pembinaan dan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pertama kali sekolah ini mendapat pendanaan dari pusat pada tahun pertama, tahun pelajaran 2008-2009 dan dilanjutkan pada tahun ke dua pada tahun pelajaran 2009-2010. Dalam menjalankan proses belajar mengajar, sekolah ini melibatkan banyak unsur yang terlibat langsung pengembangan kurikulum serta pelaksana kurikulum yaitu para guru yang menerapkan pengembangan kurikulum dalam proses belajar mengajar.

Fokus dalam penelitian ini “Bagaimana karakteristik pengembangan kurikulum di Sekolah Standar Nasional SMP?”. Fokus tersebut dijabarkan kedalam dua sub fokus:

1. Bagaimana karakteristik kurikulum di Sekolah Standar Nasional SMP?
2. Bagaimana karakteristik pengembangan kurikulum di Sekolah Standar Nasional SMP?

C. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Namun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis kurikulum di Sekolah Standar Nasional SMP.
2. Mengetahui dan menganalisis pengembangan kurikulum di Sekolah Standar Nasional SMP

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian tentang pengembangan kurikulum di Sekolah Standar Nasional SMP ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pendidikan, yang mengacu pada pengembangan kurikulum sekolah standar nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pengambil Keputusan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang pengembangan kurikulum.

b. Bagi Sekolah

Memberikan sumbangan pada pengembangan pendidikan terutama dalam pengembangan kurikulum pembelajaran yang berkualitas sehingga mendukung peningkatan prestasi belajar siswa dengan optimal sesuai dengan batas minimal ketuntasan belajar.

c. Bagi Guru

Memberikan sumbangan dalam peningkatan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam mewujudkan pengembangan kurikulum sehingga mampu memberikan

peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran serta penilaian.

d. Bagi Penulis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengembangan kurikulum sebagai dasar dalam mengadakan penelitian pendidikan tentang prestasi belajar siswa di waktu yang akan datang sehingga diperoleh hasil penelitian yang semakin beragam.

E. Definisi Istilah

1. Sekolah Standar Nasional adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang berarti memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang standar dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan.
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
3. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan pengembangan komponen-komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yaitu komponen: tujuan, bahan, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar, dan lain-lain.